



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 006 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGURUS/PEMEGANG BARANG
DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset dan barang daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak lagi ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah berdasarkan Keputusan ini, diwajibkan serah terima jabatan dengan Pejabat yang baru.

KETIGA : Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang dan Penyimpan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat Pengguna Barang:

1. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
2. mengelola/menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya/tanggung jawabnya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
3. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
5. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya; dan
6. melaksanakan tugas-tugas pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- b. Pengurus/Pemegang Barang:
1. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Kartu Induk Inventaris (KII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
 2. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 3. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada di SKPD masing-masing; dan
 4. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
- c. Penyimpanan Barang:
1. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
 2. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 3. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 4. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
 5. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
 6. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala SKPD.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum/tidak cukup diatur sehubungan dengan ketentuan tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang dan Penyimpanan Barang Daerah menurut Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
 3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Pengguna Barang, Pengurus/Pemegang Barang Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PENGGURUS/PEMEGANG BARANG DAN PENYIMPAN BARANG DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN			KETERANGAN
		PEJABAT PENGGUNA BARANG	PENGGURUS/PEMEGANG BARANG SKPD	PENYIMPAN BARANG SKPD	
1	Dinas Pendidikan	Drs. H. MAHDI NOOR, M.Si NIP. 19620106 198503 1 013 Kepala Dinas Pendidikan	NUNCI KASUMA, A.Md NIP. 19831109 201001 1 018 Staf Fungsional Dinas Pendidikan	SARWILI, S.AP NIP. 19700607 199803 1 009 Staf Fungsional Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP. 19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan	NOVIA ARIANI, A.Mk NIP. 19861117 201001 2 025 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	MAHYUDIN NIP. 19750212 201408 1 001 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
3	RSUD H. Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP. 19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	SAINI NIP. 19730201 199703 1 004 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim		Pemegang Barang Non Medis
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP. 19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DAH PUSPITA SARY, A.Md.Ak NIP. 19860813 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim		Pemegang Barang Medis
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST, MT NIP. 19670518 199803 2 004 Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	RAHMADI, A.Md.Ak NIP. 19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	NORMANSYAH NIP. 19701015 201001 1 005 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengurus/Pemegang/Penyimpan Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MAMALLI, S.STP, MT NIP. 19780508 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan	RAHMADI, A.Md.Ak NIP. 19810626 200012 1 001 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ARBAIN NIP. 19650505 200701 1 040 Petugas Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyimpan Barang UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP. 19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	NURHAVANI SARI NIP. 19710505 201001 2 002 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	HELMYADI NIP. 19710227 200701 1 010 Staf Fungsional Dinas Perum. Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

1	2	3	4	5	6
8	Dinas Lingkungan Hidup	Ir. ROWI RAWATTANICE, MT NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	PADLIANSYAH, A.Md NIP.19790805 201101 1 009 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	--	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	NORAINAH NIP.19710219 200701 2 011 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	AHMAD RIPANI, A.Mk.Ak NIP.19820814 200901 1 012 Staf Fungsional Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FADILLAH NIP.19770816 200701 1 017 Staf Fungsional Dinas Sosial	--	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP.19720306 199203 1 004 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	EKA SARTIKA, S.AP NIP.19760804 201001 2 012 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	--	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Drs. H. AKHMAD RIZALI NOOR, M.Si NIP.19620330 198503 1 009 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	ERFANSYAH NIP.19790705 200901 1 003 Staf Fungsional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	--	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	WAHYUDI NIP.19821120 201212 1 001 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
15	Satuan Polisi Pamong Praja	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	MARIANI NIP.19760108 200701 2 014 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	--	
16	Sekretariat Daerah	Drs. H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI, M.Si NIP.19630129 198503 1 005 Sekretaris Daerah	SUPARDI, SE NIP.19761111 200312 1 011 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	WILDA AFRYANI, A.Md, Ak NIP.19800409 200801 2 027 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	YASIR RAHMAN NIP.19790607 200701 1 011 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	H. JOHANI NIP.19630817 199312 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	
18	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Drs. H. ERWAN, SH, MAP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	FAHRURAZI NIP.19801010 201001 1 025 Staf Fungsional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	--	
19	Inspektorat Daerah	Drs. YUZAN NOOR, M.Si NIP.19620606 198503 1 022 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	SUMIATI, SE NIP.19801130 200701 2 006 Staf Fungsional pada Inspektorat	--	

1	2	3	4	5	6
20	Kecamatan Tanjung	ARIANTO, S.STP NIP.19800104 199810 1 002 Camat Tanjung	RAHMAT SHALEH NIP.19771019 200701 1 009 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	
21	Kecamatan Murung Pudak	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, M.IP NIP.19840301 200312 1 003 Camat Murung Pudak	EKA PUSPTA SARI, A.Md NIP.19880221 200904 2 001 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	
22	Kecamatan Tanta	Drs. BAHDUR HUSNI, M.AP NIP.19680707 198903 1 010 Camat Tanta	TAJUDDINNOOR NIP.19780514 200906 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULIA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	AKHMAD SURIANSYAH NIP.19820621 200604 1 011 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
24	Kecamatan Bannua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Bannua Lawas	KHAIRUL FADILAH NIP.19680105 200604 1 012 Staf Fungsional Kecamatan Bannua Lawas	--	
25	Kecamatan Kelua	SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua	RADIAH NIP.19690506 200701 2 031 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	JAINUL HAKIM, S.AP NIP.19821117 201010 1 025 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	--	
27	Kecamatan Jaro	H. SUWANDI, S.Sos, M.AP NIP.19680705 198903 1 016 Camat Jaro	MUSTAFA NIP.19700515 198903 1 002 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	--	
28	Kecamatan Muara Uya	ABDUL WAHID, SE.Kp NIP.19770717 199903 1 008 Camat Muara Uya	ISMAIL, A.Md NIP.19780602 201101 1 008 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	--	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, M.AP NIP.19880113 200701 1 001 Camat Haruai	TAUJUDIN NIP.19690719 200701 1 034 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Upau	GATOT SUKMANA NIP.19790615 200701 1 026 Staf Fungsional Kecamatan Upau	--	
31	Kecamatan Bintang Ara	SURYADI, S.Sos, Kp NIP.19670414 198602 1 004 Camat Bintang Ara	HIDAYATULLAH NIP.19751025 200604 1 010 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	--	
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DONO AGUS CHRISTONO NIP.19840617 200901 1 003 Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	HAJI ADIL, A.Md.Kept NIP.19810622 200904 1 002 Staf Fungsional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4	5	6
33	Badan Kepegawajan, Pendidikan dan Pelatihan	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawajan, Pendidikan dan Pelatihan	RINAWATI, S.AP NIP.19810726 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Kepegawajan, Pendidikan dan Pelatihan	--	
34	Dinas Ketahanan Pangan	Ir. NORZAIN A. YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Kepala Dinas Ketahanan Pangan	KHALWANI NIP.19760618 199603 1 002 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan	--	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	SITI AMINAH NIP.19631022 198303 2 011 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	HALSAH NIP.19810419 200801 2 012 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perikanan	Ir. H. MOHAMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 2 007 Kepala Dinas Perikanan	SYARIFUDDIN NOR, AMd NIP.19760516 200003 1 004 Staf Fungsional Dinas Perikanan	--	
38	Dinas Pertanian	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Plt. Kepala Dinas Pertanian	NOR FAJERLATI NIP.19811128 200801 2 019 Staf Fungsional Dinas Pertanian	--	
39	Dinas Tenaga Kerja	H. SYAIFUL IKHWAN, S.IP, M.Si NIP.19640908 198602 1 003 Kepala Dinas Tenaga Kerja	ACHMAD YUNUS NIP.19770202 201001 1 020 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	--	
40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PEBRIADIN HAPIZ, AP, M.Si NIP.19750208 199311 1 001 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	AHMAD RIDHA, S.Kom NIP.19920210 201903 1 012 Staf Fungsional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	--	
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	MUHAMMAD SYAFIE NIP.19720101 200701 1 040 Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ROSITA, S.Sos NIP.19760410 200701 2 019 Staf Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAINUDDIN, S.Sos NIP.19640816 198602 1 005 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HENNY YUNIDA, S.AP NIP.19841202 200801 2 007 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	

1	2	3	4	5	6
43	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Drs. MUHAMMAD FAISAL, M.Si NIP. 19621026 198603 1 016 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	ANITA ARIANI, SE NIP. 19790927 201408 2 002 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

